

EKSISTENSI GERAKAN MAHASISWA TAHUN 1966 SEBAGAI UPAYA TUMBANGKAN KEPEMIMPINAN SOEKARNO

Wiwik Damayanti

wiwikdamayanti12@students.unnes.ac.id

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Ketidakstabilan politik pada tahun 1966 dilandasi dari kurang tegasnya Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan terkait permasalahan negara yang sedang berlangsung merupakan “boomerang” bagi dirinya. Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret yang ditunjukkan oleh Soekarno kepada Soeharto sering dianggap sebagai titik awal munculnya orde baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yakni gerakan mahasiswa yang bersatu dalam KAMI tahun 1966 pada mulanya bertujuan untuk membubarkan PKI, melakukan reshuffle Kabinet Dwikora, dan menurunkan harga-harga sebagaimana yang tergambar dalam Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Namun dalam perkembangannya karena ketidaktegasan Presiden Soekarno dalam menangani masalah yang berlangsung membuat mahasiswa kehilangan kepercayaan terhadap Soekarno. Atas dasar tersebut gerakan yang orientasi utamanya adalah membubarkan PKI menjadi menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soekarno.

Kata kunci: Gerakan Mahasiswa, Soekarno, PKI, KAMI.

Abstract: Political instability in 1966 based on President Soekarno's lack of firmness in making decisions related to ongoing state problems was a "boomerang" for him. The issuance of the March Eleven Order issued by Soekarno to Suharto is often seen as the starting point for the emergence of the new order. This study uses historical research methods consisting of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The data collection technique in this research is through literature study. The conclusion drawn from the results of this research is that the student movement that united in KAMI in 1966 initially aimed to dissolve the PKI, reshuffle the Dwikora Cabinet, and lower prices as described in the Tritura (Tri Demands of the People). However, in its development, due to President Soekarno's indecisiveness in dealing with ongoing problems, students lost confidence in Soekarno. On this basis, the movement whose main orientation was to dissolve the PKI was to overthrow the leadership of President Soekarno.

Keywords: Student Movement, Soekarno, PKI, KAMI.

PENDAHULUAN

Sejarah dari perkembangan mahasiswa yang merupakan kelompok intelektual di Indonesia menunjukkan bahwa hakikatnya mahasiswa tidak hanya bergumul dalam dunia akademis belaka melainkan juga ikut serta berkiprah dalam kancah perpolitikan. Lewis Coser mengungkapkan bahwa kaum intelektual adalah kelompok yang tidak pernah merasa puas begitu saja, untuk itu mahasiswa dinilai merupakan kelompok yang memiliki kecenderungan untuk selalu mengejar kebenaran yang lebih luas (Mardianti, 2022, p. 2).

Mahasiswa merupakan golongan yang dibekali dengan ilmu pengetahuan lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat lainnya, maka sudah seharusnya menjadi garda terdepan lahirnya perubahan-perubahan. Perubahan yang dimaksudkan dalam hal ini merujuk pada upaya-upaya untuk membawa kondisi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Mahasiswa

memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi diantaranya turut serta membangun kerangka nasional bangsa, memperluas nilai kebudayaan, membina kebersamaan, memainkan peranan politik serta mempengaruhi proses perubahan sosial. Suara yang diutarakan menggambarkan adanya aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan. Ketidakpekaan pemerintahan terhadap tuntutan mahasiswa berpotensi memunculkan konflik (kegaduhan politik). Benedict Anderson melihat pemuda termasuk mahasiswa sebagai kekuatan pendorong lahirnya revolusi sebagai indikasi kegagalan (Wood, 2013, p. 188).

Gerakan mahasiswa umumnya termanifestasi dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa yang memiliki sifat masih dan terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Secara umum gerakan ini merupakan gerakan moral dengan aksi damai, meskipun dalam prakteknya sering terjadi gesekan dengan aparat yang kemudian memakan korban. Bahkan tak jarang banyak dari mahasiswa yang menjadi korban intimidasi, kekerasan dan penculikan yang kemudian hilang jejaknya (Widyarsono et al., 2012, pp. 27–28).

Berbagai gerakan yang dilakukan oleh kelompok intelektual tentunya tidak berdasar pada keisengan semata, melainkan di dasari atas bangkitnya hati nurani yang sadar akan ketidakbenaran dalam sistem pemerintahan yang tengah berlangsung. 'Pembangkangan' yang dilakukan oleh mahasiswa diawali atas hadirnya berbagai permasalahan yang menjadi keresahan public seperti kondisi sosial dan ekonomi yang buruk, meningkatkan kesenjangan sosial akibat dari ketidakadilan, kebijakan atau keputusan pemerintah yang dinilai tidak adil sehingga memunculkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan negara, kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai tidak adil, maupun sistem pemerintahan yang dinilai kurang demokratis (Hasudungan, 2020, p. 5).

Pembangkangan yang dilakukan oleh mahasiswa kemudian teraktualisasikan dalam sebuah tindakan kolektif yang dikenal dengan gerakan mahasiswa. Dalam gerakan mahasiswa terdapat berbagai macam ideology dan nilai yang diyakini, sehingga tak jarang melahirkan perbedaan orientasi tujuan dalam sebuah gerakan. Gerakan mahasiswa tidak selalu bersifat tunggal. Seperti dalam gerakan 1960-an yang tidak hanya dimiliki oleh golongan anti komunis atau anti demokrasi terpimpin, melainkan juga lahir kelompok yang mendukung Soekarno dengan kelompok mahasiswa yang berideologi komunis sebagai penyokongnya (Mardianti, 2022, p. 4).

Apabila melihat dari sudut pandang macam-macam gerakan, gerakan mahasiswa sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu gerakan moral dan gerakan politik. Dalam hal ini gerakan moral juga dapat disebut sebagai gerakan politik regresif (lawan dari progresif). Gerakan politik progresif adalah gerakan yang termarginalkan berdasarkan pembebasan sosial emansipatif karena adanya ketimpangan antara kelas yang berkuasa dengan kelas tertindas. Sedangkan gerakan politik regresif atau gerakan moral adalah gerakan yang memperjuangkan kebenaran yang diyakini dan tidak meminta sumbangsih (Novianto, 2016, p. 198). Melihat pola gerakan dan tuntutan yang diajukan maka dapat direpresentatifkan bahwa gerakan mahasiswa sepanjang tahun 1966 merupakan sebuah gerakan moral.

Berbicara mengenai gerakan mahasiswa tahun 1966 tidak terlepas dari mulai munculnya banyak perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 1950 dan 1960-an yang diikuti dengan kenaikan pesat jumlah mahasiswa apabila dibandingkan dengan masa kolonial. Pada tahun 1947 tercatat terdapat 387 mahasiswa, kemudian pada tahun 1965 jumlah tersebut

meningkat menjadi kurang lebih 280.000 orang (Widyarsono et al., 2012, p. 6). Selain terfokus pada ranah intelektual, tak sedikit mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar perguruan tinggi. Para mahasiswa memilih untuk mengembangkan pemikiran melalui kegiatan organisasi dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda.

Dinamika kondisi pada masa orde lama dimulai dari permasalahan perekonomian, sosial, hingga politik melahirkan sebuah gerakan besar yang diilhami oleh golongan mahasiswa. Hiruk pikuk dunia perpolitikan tahun 1959 dibersamai dengan munculnya kekacauan ekonomi yang melahirkan inflasi tinggi. Untuk menangani permasalahan inflasi di Indonesia, pemerintah masa tersebut mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk menunjang tujuan tersebut, pemerintah menurunkan nilai uang kertas pecahan Rp. 500,00 dan Rp. 1000,00 menjadi masing-masing Rp. 50,00 dan Rp. 100,00 agar uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu tinggi nilainya. Selain itu, juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1959 tentang pembekuan simpanan di bank (Robiyani, 2015, pp. 31–32). Hal ini tentunya memunculkan kontroversi di masyarakat terutama kerugian negara karena banyaknya uang yang beredar dalam perdagangan export-impor dan perdagangan dalam negeri. Penghasilan negara yang berasal dari devisa dan penerimaan lainnya dalam mata uang rupiah ikut merosot sehingga devisa anggaran belanja menjadi lebih besar lagi. Ketidakstabilan ekonomi yang masih berlangsung memunculkan ketidakpuasan dari masyarakat atas kebijakan tidak tepat yang dinilai justru merugikan rakyat.

Sejak tahun 1963-1964 Indonesia mengalami krisis yang memunculkan disintegrasi sosial ekonomi akibat dari kegelisahan dan kebingungan yang dirasakan rakyat. Kondisi politik Indonesia tahun 1960 sampai 1965 diwarnai oleh tiga kekuatan besar yaitu Soekarno, ABRI khususnya Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia (Widyarsono et al., 2012, p. 6). Dinamika politik yang tidak stabil terutama karena keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) turut serta berdampak pada kacaunya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kalahnya pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) telah membuka jalan bagi PKI untuk mendominasi peran di masyarakat. Pada awalnya, mayoritas dari rakyat memilih bungkam terhadap kondisi yang sedang berlangsung karena merasa tertekan akan teror mental dan teror fisik PKI dengan provokasi dan intimidasi. Hingga pada puncaknya setelah meletusnya peristiwa kudeta yang terjadi pada 30 September 1965, gejala pergerakan mahasiswa dalam aksi semakin menguat dengan maksud menagih kinerja Soekarno dalam segala permasalahan yang ada di Indonesia mulai dari masalah perekonomian hingga kekacauan politik akibat dari adanya G30S/PKI. Pembunuhan tujuh petinggi militer Indonesia ini merupakan tanda awal dari akhir cengkraman kekuasaan Soekarno. Moerdiono dalam buku Sejarah Resmi Indonesia Modern mengungkapkan bahwa dalam 8 tahun menjelang 1965, Indonesia hidup dalam periode kekacauan (Wood, 2013, p. 193). Hal lain yang cukup mengejutkan adalah ketidakstabilan politik diwarnai dengan kenaikan harga dari penguasa. Besar dugaan bahwa pemerintah mengalihkan perhatian rakyat dari pengganyangan PKI menjadi isu perut (Meidiansyah, 2021, p. 130).

Gerakan mahasiswa tahun 1966 merupakan wujud dari bangkitnya rasa kepedulian mahasiswa akan nasib bangsa dan negaranya. Keberadaan gerakan mahasiswa sangatlah penting dalam proses pembangunan bangsa. Meskipun kedudukan mahasiswa tidak dapat

disamakan dengan kekuatan sosial politik formal dalam pemerintahan namun suara mereka sangatlah berpengaruh dalam menentukan arah pemerintahan negara (Maiwan, 2015, p. 1). Pertanyaan penelitian yang kemudian muncul dalam narasi ini adalah bagaimana kemudian hingga gerakan mahasiswa tahun 1966 ini mampu menumbangkan kepemimpinan orde lama? Mengingat Soekarno pada masa tersebut merupakan orang yang sangat berkuasa.

Sistem demokrasi yang dijalankan pada masa itu tak jarang membuat Soekarno dinilai sebagai sosok pemimpin yang otoriter (Marliani & Nurhalimah, 2020, p. 8). Fokus dalam penelitian ini yaitu pada dinamika gerakan mahasiswa tahun 1966 yang dimulai dari dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), puncak dari gerakan mahasiswa yang melahirkan tiga tuntutan rakyat (Tritura), hingga dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menandakan berakhirnya kekuasaan orde lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan eksistensi gerakan mahasiswa terbesar pertama yang muncul setelah kemerdekaan ini, serta hal-hal yang menjadi keresahannya. Disebut sebagai gerakan mahasiswa terbesar karena dampak signifikan yang dihasilkan dari kesatuan aksi hingga mampu menumbangkan kekuasaan Ir. Soekarno selaku orang nomor satu pada masa orde lama.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Pemilihan metode ini sangat tepat untuk meneliti tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa tahun 1966 yang pada akhirnya menghasilkan keputusan bernama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi literature yakni mengumpulkan sumber-sumber yang sesuai dengan topik penelitian baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Menurut Kuntowijaya, terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Pemilihan Topik

Dalam langkah yang pertama ini, peneliti harus mampu memilih permasalahan yang akan diteliti. Topik dapat dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan seperti kedekatan emosional dan kedekatan intelektual guna memperlancar penelitian serta menghasilkan tulisan yang tepat. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai eksistensi gerakan mahasiswa tahun 1966 hingga akhirnya mampu menumbangkan kepemimpinan Orde Baru.

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik merupakan tahap menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti dituntut untuk mencari sumber sejarah, jejak, data, atau fakta pada masa lampau. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan FIS UNNES, Perpustakaan UNNES, serta buku maupun jurnal yang disediakan secara online.

3. Verifikasi (kritik sumber)

Tahapan berikutnya dalam penelitian sejarah yaitu kritik sumber atau dapat disebut juga sebagai proses verifikasi. Pada tahapan ini data atau sumber yang telah didapatkan kemudian diuji untuk menentukan keabsahan dan kevalidan sumber sejarah. Kritik sumber sendiri dibagi menjadi dua yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal merupakan

penilaian keakuratan pada sumber atau materi sejarah dengan cara menyelidiki substansi isi dari dokumen sejarah. Sedangkan kritik eksternal dimaksudkan untuk memeriksa keaslian (*autentitas*) data melalui keadaan luar yang meliputi bahan pembuatan sumber sejarah ataupun identifikasi tulisan. Dalam sebuah penelitian sejarah, tahapan ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahpahaman pada data yang dihasilkan dikarenakan penelitian membutuhkan sumber yang valid dan berdasarkan fakta.

4. Interpretasi

Tahap berikutnya dalam penelitian sejarah adalah melakukan interpretasi, yaitu penafsiran dan analisis terhadap data dan fakta yang sudah diperoleh. Setelah sumber sejarah melalui proses verifikasi atau kritik sumber, maka langkah berikutnya adalah data ditafsirkan sebagai bahan penulisan sejarah. Kuntowijoyo berpendapat bahwa seorang sejarawan harus mampu membayangkan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Interpretasi fakta harus dilakukan dengan objektif.

5. Historiografi

Setelah ke-empat tahapan tersebut dilalui, maka tahap akhir yang dilakukan peneliti adalah historiografi yaitu melakukan penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan atau pelaporan penelitian sejarah, fakta-fakta yang telah dianalisa kemudian dirangkai sedemikian rupa hingga menghasilkan kisah sejarah. Pada tahapan ini peneliti menuliskan hasil pemahaman dan interpretasi atas fakta sejarah dalam bentuk analisis narasi deskriptif yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Sukmana, 2021, pp. 3–4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)

Krisis tahun 1963-1964 menyebabkan munculnya kegelisahan dan kebingungan yang dialami rakyat sehingga menimbulkan disintegrasi sosial ekonomi yang merugikan bangsa Indonesia. Pada tanggal 08 Oktober 1966, para mahasiswa memenuhi jalanan dan membakar markas besar Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta karena adanya peristiwa kudeta pada 30 September (Robiyani, 2015, p. 27). Pada 25 Oktober 1965 dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang merupakan wujud kesatuan semangat mahasiswa untuk menghadapi keadaan setelah adanya G30S/PKI. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa aksi harus benar-benar berasal dari mahasiswa sendiri, bukan pihak lainnya. Atas prakarsa Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan), Brigjen Sjarif Thayeb KAMI dibentuk.

Anggota dari KAMI merupakan gabungan dari mahasiswa dan 17 ormas. Organisasi-organisasi perguruan tinggi yang menjadi anggota KAMI mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Mapancas (Mahasiswa Pancasila), Somal (Sentral Organisasi Mahasiswa Lokal), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Semmi (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), PELMASI (Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia), Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), dan Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis) (Widyarsono et al., 2012, p. 9).

Tujuan dibentuknya KAMI adalah untuk mengamalkan dan mengamankan nilai-nilai Pancasila, anti nekolim (neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme), dan membantu ABRI

untuk melawan komunis (Rissam, 2018, p. 2). KAMI lahir di tengah dualisme ormas kemahasiswaan akibat adanya nasakomisasi dunia kemahasiswaan yang keduanya dikuasai oleh kelompok mahasiswa kiri yaitu Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang merupakan federasi dari organisasi mahasiswa di luar perguruan tinggi dan Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) yang merupakan gabungan dewan mahasiswa intra perguruan tinggi. Untuk mendobrak dualisme di antara kedua organisasi tersebut, terciptalah KAMI yang menghimpun mahasiswa anti komunis terutama mahasiswa ekstra Perguruan Tinggi (Robiyani, 2015, p. 28). Banyaknya organisasi yang tergabung dalam KAMI merupakan potret keseriusan aksi mahasiswa pada masa tersebut.

Setelah berdirinya KAMI pusat, berbagai kesatuan aksi mahasiswa lainnya juga terbentuk seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan kesatuan aksi lainnya. Setelah konsolidasi dilaksanakan, mahasiswa menggalang kekuatan yang lebih besar dengan cara menugaskan organisasi di daerah agar bekerjasama dengan organisasi mahasiswa lainnya untuk membentuk KAMI di tingkat daerah. Meskipun dalam ukuran yang terbatas, aksi demonstrasi tetap dilancarkan dengan arah perjuangan menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya (Widyarsono et al., 2012, p. 9).

Pada 23 Desember 1965 diadakan kongres oleh Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang bertempat di gedung Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jalan Sam Ratulangi Jakarta Pusat dengan agenda tunggal yaitu pembubaran PPMI. Secara aklamasi akhirnya PPMI pun dibubarkan. Pada akhir bulan Desember 1965, diadakan rapat KAMI di Margasoswa II Jalan Mangga Besar No. 8 yang mengundang Brigjen Alamsjah Ratu Prawiranegara selaku staf pribadi Soeharto (Widyarsono et al., 2012, pp. 9–10). Pada masa tersebut hubungan KAMI dengan tentara terutama Angkatan Darat sangatlah erat. Ketika sedang berlangsung diskusi, Presidium KAMI Pusat mendengar keputusan pemerintah mengenai penurunan nilai mata uang yang mencapai 1000 persen. Kondisi tersebut menggambarkan terpuruknya perekonomian negara karena laju inflasi yang tidak dapat dibendung lagi sehingga mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok secara tidak terkendali.

Kondisi perekonomian negara yang kian memburuk menjadi pertimbangan KAMI untuk menetapkan langkah yang akan diambil kedepannya. Mahasiswa pada saat itu sudah tidak tahan lagi untuk hidup dengan harga-harga yang melambung tinggi. Selain itu, mereka juga menafsirkan bahwa kenaikan harga dari pemerintah merupakan sebuah strategi politik untuk mengalihkan perhatian rakyat dari peristiwa G30S/PKI. Rencana demonstrasi besar-besaran disusun untuk mengajukan tuntutan kepada Presiden Soekarno. Akhirnya dihasilkan keputusan dalam rapat KAMI bahwa demonstrasi akan dilaksanakan pada 10 Januari 1966. Sehari sebelum peristiwa itu, tepatnya pada 9 Januari tiga perwakilan KAMI Pusat yaitu Ismid Hadad (Ikatan Pers Mahasiswa), Saverinus Suwardi (PMKRI) dan Nazaruddin Nasution (HMI) merumuskan tuntutan yang menjadi aksi pergerakan yang kemudian dikenal dengan nama Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Tiga tuntutan tersebut murni dari ide mahasiswa yang diambil dari hati nurani rakyat yang memilih untuk tidak bersuara.

Puncak Pergerakan Mahasiswa yang Melahirkan Tritura

Ketidaktegasan tindakan yang diambil Presiden Soekarno dalam menindaklanjuti dan menghukum Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan dalang pemberontakan 30 September 1965 menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Cosmas Batubara pemimpin aksi mahasiswa tahun 1966 memberikan keterangan bahwa pada dasarnya gerakan mahasiswa sudah sering dilaksanakan sebelum peristiwa kudeta ini, terutama gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang kontra dengan Nasakom (Widyarsono et al., 2012, p. 54). Nasakom merupakan konsep yang menjadi dasar kesatuan identitas politik Indonesia yang berisikan nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep Nasakomisasi ini dinilai merupakan sebuah usaha untuk mendorong Indonesia berhaluan kiri dan memfasilitasi pengambilalihan oleh PKI. Untuk itu dengan adanya konsep ini memberikan PKI sebuah ruang untuk lebih menanamkan pengaruhnya di Indonesia hingga melakukan tindakan anarkis tidak bermoral.

Pada 10 Januari 1966 dilaksanakan apel besar di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Apel yang dikoordinir oleh KAMI Pusat dan KAMI Jaya tersebut dihadiri oleh para mahasiswa, pemuda, dan pelajar yang kemudian mencetuskan lahirnya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Tiga tuntutan tersebut yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang pemberontakan berdarah pada 30 September 1966, rombak Kabinet Dwikora dan turunkan harga-harga. Aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa Indonesia pada 10 Januari 1966 dimulai dari Jalan Diponegoro menuju Hotel Indonesia (HI) hingga kemudian menuju kantor Wakil Perdana Menteri (Waperdam) III Chairul Saleh guna menyampaikan tuntutan yang telah dirumuskan dalam bentuk Tritura. Aksi ini kemudian diperingati sebagai hari Kebangkitan Mahasiswa. Gerakan KAMI dikenal dengan nama angkatan 66 yang mana Cosmas Batubara, Jamroni, Marye Muhammad, Ismut Hadad, dan Nano Karim sebagai pelopornya (Robiyani, 2015, pp. 36–37).

Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa juga dibarengi dengan aksi mogok kuliah. Para mahasiswa mendatangi pompa-pompa bensin dan memaksa mereka untuk menjual bensin seharga Rp. 250 perliter. Akibatnya banyak pompa bensin yang memilih tutup dan menyebabkan antrian panjang kendaraan di pompa bensin yang buka. Aksi mahasiswa tersebut membuat diselenggarakannya sidang Kabinet Pripurna di Bogor pada 15 Januari 1966 yang menghasilkan keputusan akan diturunkannya harga bensin dan tarif angkutan umum. Selain itu, dalam rapat tersebut Presiden Soekarno menuduh bahwa aksi mahasiswa ditunggangi oleh Nekolim (*Neokolonialisme* dan *Imperialisme*), khususnya oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat. Atas tuduhan tersebut, kemudian Presiden Soekarno mengomandoi pembentukan Barisan Soekarno dengan tujuan untuk mempertahankan kedudukannya ditengah aksi-aksi yang terus digelorakan para mahasiswa. Pada 16 Januari 1966 diadakan kampanye dengan tujuan mempertahankan dan memperkuat ajaran-ajaran Soekarno (Robiyani, 2015, pp. 30–31).

Menanggapi situasi yang sedang berlangsung, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyatakan bahwa akan tetap patuh terhadap Panglima Tertinggi ABRI serta menjaga kekompakan baik antar sesama ABRI maupun dengan rakyat Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat berpendapat bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah barisan Soekarno, sehingga pembentukan Barisan Soekarno secara fisik dinilai tidak diperlukan (Robiyani, 2015, p. 31). Larangan pembentukan Barisan Soekarno di Jawa Barat muncul dari Penguasa Pelaksana

Dwikora Daerah (PPLRADA) Jawa Barat yang kemudian didukung oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMII) Pusat dengan alasan dikhawatirkan pembentukan barisan ini akan meningkatkan perpecahan di kalangan rakyat Indonesia.

Gagalnya pembentukan Barisan Soekarno, membuat Presiden Soekarno kembali mengomandoi untuk membentuk Barisan pembela Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada 20 Januari 1966. Pihak yang tidak menyukai adanya Tritura kemudian melakukan penghasutan terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk membalas aksi yang dilakukan KAMI dengan cara melakukan teror. Perjuangan Tritura juga didukung oleh Front Pancasila dan ABRI. Pada tanggal 14 Februari 1966, Front Pancasila mengeluarkan lima pasal yang isi pokoknya mendukung keberadaan Tritura dan menolak segala bentuk fitnah yang ditujukan kepada KAMI dan Front Pancasila. Dalam setiap aksinya, secara diam-diam KAMI mendapatkan dukungan dari tentara yang senantiasa melindungi mereka dari serangan pro komunis. Disamping itu KAMI juga menjalin hubungan yang cukup erat dengan tokoh-tokoh militer diantaranya Jenderal HR Dharsono, Kemal Idris dan Sarwo Edhi Wibowo yang merupakan tokoh penting dalam pengendalian situasi setelah peristiwa 30 September. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam aksi demonstrasi tahun 1966, mahasiswa bekerjasama dengan Angkatan Darat (Widyarsono et al., 2012, p. 12).

Tersudutnya posisi Presiden Soekarno atas tuntutan yang terus-menerus dilayangkan kepadanya membuat Presiden Soekarno melakukan *reshuffle* kabinet. Keputusan Presiden Soekarno mula-mula disambut positif oleh masyarakat. Terlebih lagi demonstrasi yang dilancarkan mahasiswa secara terus-menerus cukup membuat masyarakat dilanda kegelisahan. Namun hasil *reshuffle* yang diumumkan pada 21 Februari 1966 tersebut tidak sesuai dengan harapan rakyat, justru cenderung mengecewakan. *Reshuffle* yang diberi nama dengan “Kabinet Dwikora yang disempurnakan” beranggotakan 102 Menteri yang mana tokoh-tokoh yang gigih menentang G30S/PKI seperti Jendral A.H Nasution selaku Menteri Koordinator Hankam justru disingkirkan dari jabatannya. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang diindikasikan terlibat dalam G30S/PKI seperti Ir. Surachman dan Oei Tjoe Tat, S.H. justru diangkat sebagai menteri. Maka dari itu para mahasiswa memberi nama kabinet ini sebagai Kabinet Gerakan 30 September (GESTAPU) (Robiyani, 2015, p. 32). Kebijakan *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tidak meredakan aksi-mahasiswa, justru sebaliknya, keputusan tersebut diibaratkan seperti bensin yang disiramkan ke api yang sedang berkobar.

Upacara pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan berlangsung pada 24 Februari 1966. Pada saat yang sama, aksi demonstrasi besar-besaran kembali dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar guna menentang keputusan Presiden Soekarno. Gerakan ini tercatat sebagai aksi demonstrasi terbesar sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Ribuan mahasiswa bergerak di jalanan menempati titik-titik yang strategis, menghadang lalu lintas dan melakukan aksi pengempesan ban mobil. Hal ini membuat lalu lintas di seluruh Jakarta menjadi macet total yang berdampak pada lumpuhnya instansi-instansi pemerintahan maupun swasta. Para demonstran memenuhi jalanan sambil meneriakkan “Bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari menteri gestapu dan orang-orang yang tidak konsisten akan janjinya dan turunkan harga barang”. Isi tuntutan tersebut kembali mencerminkan Tritura. Berdasarkan isi dari Tritura dan keterangan dari Fahmi Idris selaku mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi tahun 1966 maka dapat diambil poin penting bahwa pada awalnya aksi demonstrasi tidak bertujuan untuk

menjatuhkan kepemimpinan Soekarno, gerakan pertama bertujuan membubarkan PKI (Widyarsono et al., 2012, p. 34). Pergerakan KAMI sebagai upaya meruntuhkan kekuasaan Presiden Soekarno berjalan seiring dengan perkembangan gerakan yang akhirnya terealisasi secara terang-terangan pada 17 Agustus 1966 dalam kampanye anti Presiden Soekarno (Hasudungan, 2020, p. 5).

Pada tanggal 2 Mei 1966, para mahasiswa kembali menyerbu Gedung yang digunakan sebagai tempat Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) untuk menyampaikan sebuah Nota Politik. Nota Politik tersebut dibacakan oleh Presidium KAMI Pusat yaitu Komnas Batu Bara yang berisikan kupasan penyelewengan-penyelewengan konstitusional pada masa Orde Lama dan menuntut pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni.

Jatuhnya Pemerintahan Orde Lama : Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret

Ketika berlangsungnya sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin langsung Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, Mahasiswa terus melancarkan aksinya diluar gedung hingga membuat sidang ini tidak selesai (gagal) dan Presiden harus diungsikan. Hal tersebut merepresentatifkan semakin merosotnya wibawa Presiden dan Pemerintah. Sejak tanggal 1 Oktober 1965 Pimpinan Angkatan Darat diserahkan kepada Mayor Jendral Soeharto dengan tugas memperbaiki keamanan dan ketertiban seperti sedia kala. Hal ini sekaligus menandai awal dari akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan munculnya figur politik nasional yaitu Soeharto. Sejak saat itu dengan diprakarsai oleh Mayor Jendral Soeharto, dilaksanakan operasi pembersihan baik fisik, militer, maupun mental dalam rangka menegakkan kembali wibawa pemerintahan yang telah dicoreng oleh PKI. Berbagai pemberantasan terhadap sisa-sisa G30S/PKI beserta ormas-ormasnya gencar dilakukan, di samping itu juga dilakukan pembersihan terhadap sipil dan militer dari unsur PKI. Namun meskipun demikian, hingga saat ini detail mengenai peristiwa G30S/PKI terutama siapa yang sebenarnya berada di belakang peristiwa kudeta tersebut dan apa motifnya masih menjadi kontroversi yang luar biasa. Namun sebuah artikel meyakini bahwa PKI memang berusaha untuk merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan (Wood, 2013, p. 193).

Aksi pengecaman yang menuduh Presiden Soekarno sebagai dalang dibalik tragedi 30 September 1965 diduga membuat jiwanya tidak stabil yang berimbas pada menurunnya kesehatannya. Sakitnya Soekarno dan situasi yang semakin tak terkendali menjadi pemicu diambilnya keputusan penting guna mengatasi hal tersebut (Nuryanti, 2008, p. 29). Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Panglima Angkatan Darat yaitu Letnan Jendral Soeharto yang kemudian dikenal dengan nama "Surat Perintah 11 Maret (Supersemar)". Isi dari Supersemar yaitu memerintahkan kepada Letnan Jendral Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atas nama Presiden, yang pertama untuk mengambil tindakan yang dirasa perlu guna menjamin keamanan dan kestabilan pemerintahan demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima angkatan lain dengan semaksimal mungkin. Ketiga, melaporkan segala hal yang bersangkutan dengan tanggungjawab tersebut. Dengan berlandaskan pada Supersemar, Letnan Jendral Soeharto mengambil keputusan-keputusan

penting guna memberi arah baru dalam perjalanan hidup bangsa dan negara (Naimah, 2015, p. 8).

Supersemar sering dianggap sebagai tombak awal peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru. Namun demikian, Suwoto Mulyosudarmo berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya Supersemar bukan berarti telah terjadi perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Letnan Jendral Soeharto. Secara hukum kekuasaan pemerintahan masih berada di tangan Presiden Soekarno. Dalam Supersemar juga terdapat referendum bahwa tindakan yang diambil merupakan atas nama presiden. Dengan demikian Letnan Jendral Soeharto mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Presiden Soekarno, kemudian Presiden mempertanggungjawabkannya kepada MPRS. Dalam sidang MPRS pada 20 Juni 1966 dikeluarkan sebuah keputusan yaitu TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 yang berisi pengukuhan Supersemar, artinya memberikan dasar kuat bagi Letnan Jendral Soeharto untuk melakukan kegiatan kenegaraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Letnan Jendral Soeharto merupakan orang kedua terpenting dalam kepemimpinan nasional tahun 1966.

Ketika pembubaran Kabinet Dwikora dan pembentukan Kabinet Ampera, Letnan Jendral Soeharto diangkat sebagai Ketua Presidium Kabinet sehingga menjadikan Soeharto sebagai orang yang tampil dalam pemerintahan dan memberikan keterangan dalam sidang pleno terbuka DPR GR tanggal 16 Agustus 1966. Berdasarkan keputusan MPRS No. V/MPRS/1966, Presiden Soekarno diminta untuk melengkapi laporan pertanggungjawabannya mengenai sebab-sebab peristiwa G30S/PKI. Presiden yang sebelumnya telah menyampaikan amanat yang berjudul Nawaksara kemudian memberikan pelengkap Nawaksara kepada pimpinan MPRS. Namun pada 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah mangkir dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Nawaksara dan pelengkapannya tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai peristiwa G30S/PKI. Di samping itu, DPRGR mengeluarkan memorandum pada 9 Februari 1967 bahwa hal yang dilakukan Presiden Soekarno membahayakan negara. Untuk itu DPR GR mengusulkan dilaksanakannya sidang istimewa MPRS untuk memberhentikan Presiden Soekarno (Naimah, 2015, p. 11)

Pada 7 September 1967 Presiden Soekarno mengirim surat kepada Jenderal Soeharto dengan maksud memberikan mandat pemegang Supersemar untuk memimpin pemerintahan sehari-hari di samping keberadaan Presiden. Hal ini merupakan potret adanya dualisme pemerintahan yang dianggap sebagai hambatan suksesnya program Kabinet Ampera. Menyadari kedudukannya yang semakin melemah dan suasana yang semakin tidak kondusif, akhirnya pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 yaitu Jendral Soeharto (Rissam, 2018, p. 9). Dengan didasarkan pada beberapa poin mulai dari Presiden Soekarno yang dinilai tidak memenuhi pertanggungjawabannya kepada konstitusional serta tidak menjalankan haluan dan putusan MPRS, untuk itu dilakukan penyerahan kekuasaan tersebut adalah TAP MPRS No. XV/MPRS/1966 yang berisi menyatakan bahwa apabila Presiden berhalangan hadir maka pemegang Surat Perintah Sebelas Maret yang memegang jabatan presiden. Pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diadakan sidang istimewa MPRS yang menghasilkan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang memutuskan bahwa:

- a. Mencabut Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945.
- b. Mengangkat pemegang TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Jendral Soeharto sebagai pejabat presiden yang dipilih oleh MPR berdasarkan hasil pemilihan umum.

Dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS tersebut maka secara resmi kekuasaan negara telah berpindah dari Soekarno ke tangan Soeharto. Peristiwa ini tercatat sebagai peralihan kekuasaan presiden Indonesia pertama setelah kemerdekaan. Pada 27 Maret 1968 dengan didasarkan pada TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968 Jendral Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia sampai dengan terpilihnya Presiden yang baru oleh MPR melalui pemilihan umum (Erlina, 2020, p. 7). Keberhasilan Soeharto hingga menjadi pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh hasil pemilu MPR merefleksikan kemenangan dari Tritura.

KESIMPULAN

Aksi demonstrasi tidak bertujuan untuk menjatuhkan kepemimpinan Soekarno, hanya saja menuntut untuk dibubarkannya PKI. Namun dalam perkembangannya karena ketidaktegasan Presiden Soekarno dalam mengatasi masalah membuat tuntutan bertambah menjadi memberhentikan Presiden Soekarno yang digambarkan melalui kampanye anti Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1966. Pidato Nawaksara yang dilontarkan Presiden Soekarno dinilai merupakan potret ketidaktegasan dan ketidakmampuan Soekarno menghadapi situasi yang berlangsung. Dikeluarkannya Supersemar pada 11 Maret kepada Presiden Soeharto menggambarkan diberikannya wewenang kepada Soeharto untuk melakukan segala tindakan yang dirasa perlu guna menjamin kestabilan dan keamanan negara. Lahirnya Supersemar sering dinilai sebagai ujung tombak dimulainya Orde Baru.

Padahal dalam kenyataannya Presiden masih berkuasa penuh sebagai kepala negara, sehingga terdapat dualisme kepemimpinan yang dinilai menghambat kemajuan negara. Kesadaran Presiden Soekarno yang tidak lagi mendapat dukungan rakyat membuatnya menyetujui penyerahan kekuasaan negara secara penuh kepada pemegang mandat Supersemar pada 22 Februari 1967. Keputusan Soekarno kemudian disusul dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang memutuskan dicabutnya kekuasaan Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan pengangkatan Jendral Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilangsungkannya pemilihan umum di MPR. Dengan itu Indonesia telah mengalami perpindahan periode dari Orde Lama ke Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, T. (2020). Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 7(1), 95. <https://doi.org/10.25157/wa.v7i1.3253>
- Hasudungan, A. N. (2020). TNI-AD dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dalam Kelengseran Soekarno Tahun 1965-1968. *Yupa: Historical Studies Journal*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i1.173>
- Maiwan, M. (2015). Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 49–63.

- <https://doi.org/10.21009/jimd.v14i2.9105>
- Mardianti, E. (2022). *Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan : Antara Gerakan Moralis Atau Gerakan Politis*. 2(2), 82–103.
- Marliani, W., & Nurhalimah, S. (2020). Dinamika Politik Dalam Perspektif Kepemimpinan Di Indonesia. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 10(1), 81.
- Meidiansyah, I. (2021). *Pemikiran Politik Soe Hok Gie Dalam Buku Catatan Seorang Demontran*. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9596>
- Naimah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(2), 119–139.
<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>
- Novianto, A. (2016). Pergulatan Gerakan Mahasiswa Dan Kritik Terhadap Gerakan Moral. *Indonesia Bergerak 2, 2008*(July), 227.
- Nuryanti, R. (2008). *Tragedi Sukarno dari Kudeta Sampai Kematianannya*. Ombak.
- Rissam, T. N. (2018). Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dalam Pergolakan Politik Indonesia (1965-1970). *Risalah*, 5(5), 549–559.
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/view/12750>
- Robiyani, A. (2015). *Perjuangan Mahasiswa Indonesia Pada Masa Orde Lama Tahun 1945-1966 (Studi Pergerakan Mahasiswa Angkatan 66)*. 87.
<http://repository.uinbanten.ac.id/186/>
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah). *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–4.
- Widyarsono, T., Santoso, A., & Purwoko, D. (2012). Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998. *Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan*, 9–10.
[http://repositori.kemdikbud.go.id/12775/1/Pengumpulan sumber sejarah lisan gerakan mahasiswa1966 dan 1998.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/12775/1/Pengumpulan_sumber_sejarah_lisan_gerakan_mahasiswa1966_dan_1998.pdf)
- Wood, M. (2013). *Sejarah Resmi Indonesia Modern* (A. Pratama (ed.)). Ombak.